

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2018). Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang*, 6(03), 207-222.
- Andi, A. (2020). Pemanfaatan E-Government Dalam Tatakelola Pemerintahan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 236-243.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66-66.
- Cahyadi, R. (2016). Inovasi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 10(3), 569-586.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- DYAH, S. (2009). Karakteristik Inovasi, Pengetahuan, Komunikasi Pemasaran, Persepsi Risiko Dan Stockout Dalam Keputusan Penundaan Adopsi Inovasi. *Kolokium Nasional Program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM*, 135-169.
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2018). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalgrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156-167.
- Eprilianto, D. F., Lestari, Y., Megawati, S., & Oktariyanda, T. A. (2021). Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Sebagai Upaya Adaptasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Era New Normal. *Communnity Development Journal*, 2(3), 767-776.
- Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah Dari Persepektif Regulasi, Konseptual, Dan Empir (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH: Journal Of Government, Social and Politics*, 4(1), 48-61.
- Habibullah, A. (2010). Kajian pemanfaatan dan pengembangan E-government. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jember*, 3(3), 187-195.
- Hapsari, A., Guntur, M., & Rukmana, N. S. (2021). Inovasi Pelayanan Publik (PAKDES: Aplikasi Laporan Dana Desa Kreatif Berbasis Online di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros). *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 283-304.
- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2016). Konsep dan Strategi E-Government. *Yogyakarta: Andi Yogyakarta*.

- Kotijah, S. (2020). Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission. *Yogyakarta Bantul*.
- Kurniati, N. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Investasi Di Kota Mataram. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 2 (2), 71–81.
- Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(01), 39-47.
- Noviyanti, N. A., & Pinasti, V. I. S. (2021). Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Batik Pekalongan Pasca Pembangunan Jalan Tol Transjawa. *E-Societas*, 10(1).
- Oktaviani, R. D., & Setyahrambang, M. P. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Bandung. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 69-90.
- Permana, T. I. P., & Manar, D. G. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah: Lek Paijo (Layanan Elektronik Pajak Daerah Sistem Jaringan Online) Untuk Menciptakan Good Governance di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 111-121.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media komunikasi bagi remaja perempuan dalam pencarian informasi kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 15-22.
- Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(10), 1-15.
- Puspitasari, M. E., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1-12.
- Rafinzar, R., & Kismartini, K. (2020). Inovasi e-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Faktor Pendukung dan Penghambat Program e-Musrenbang di Kota Surabaya). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 227-250.
- Rimbawani Sushanty, V. (2020). Buku Ajar Hukum Perijinan.
- Ronnyta, R. V., & Herawati, N. R. (2020). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Simut Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(03), 81-90.
- Sabana, C. (2007). *Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 194-211.

- Sari, D. P., Nurlinah, N., & Irwan, A. L. (2013). Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 101-110.
- Solong, A., & Muliadi, M. (2020). Inovasi Pelayanan Publik. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, 76-86.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi di sektor publik.
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212-224.
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-18.
- Ulfa, M., Mahsyar, A., & Ma'ruf, A. (2020). Inovasi Pelayanan Pendidikan (Studi Kasus: Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 115-129.
- Wahyudi, S. (2019). Teori Inovasi: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Valuta*, 5(2), 93-101.
- Widiastuti, R. N., & Yuwono, T. (2019). Inovasi kampung tematik di Kota Semarang, pembangunan kawasan kumuh berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (Studi kasus: Kampung sehat ramah anak). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 351-360.
- Wijaya, A., & Susetyo, C. (2017). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan Tahun 2003, 2009, dan 2016. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), C417-C420.

### **Dokumen Negara**

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 503/1198 tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* di Pemerintah Kota Pekalongan
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017  
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021  
Tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang  
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pelayanan  
Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Aplikasi  
Perizinan Online Ringkas Dan Ekonomis (Sakpore) Di Kota Pekalongan

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan  
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Pekalongan.